

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Aplikasi e-planning merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan tujuan dapat mengawal pembangunan disetiap daerah agar seluruh perencanaan daerah dapat berjalan dengan lancar, seluruh perencanaan dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah dipantau. Pada tahap pembahasan, peneliti akan memaparkan serta mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan terkait bagaimana penerapan aplikasi e-planning dalam penerapan aplikasi E-Planning oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini, pengukuran dalam teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan stakeholder atau sasaran narasumber yang terpilih. Sehingga sasaran narasumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian mengenai “Penerapan Aplikasi E-Planning dalam Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018”, peneliti menggunakan teori indikator penerapan e-government. Teori tersebut dapat memberi suatu gambaran terhadap peneliti dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun penerapan aplikasi agar berjalan dengan efektif, efisien, dan dan baik sesuai dengan standarisasi perencanaan. Sehingga

indikator-indikator dalam teori tersebut dapat menjadi acuan atau indikator dalam penelitian untuk terjun kelapangan secara langsung.

Menganalisis dalam suatu program berbasis elektronik yang di implementasikan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan yakni berupa program penerapan aplikasi e-planning yang telah dijalankan sejak tahun 2017 lalu. Program e-planning adalah suatu program yang berpusat pada BPPPPD dan dijalankan seluruh OPD pada daerah yang berisi tentang indikator-indikator dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun, bersama dengan Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Restra dan Renja.

Dalam menganalisis penerapan kebijakan aplikasi e-planning tersebut menggunakan data primer berupa wawancara secara langsung bersama BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka bersama responden yang yaitu Kepala Badan BPPPD (Bapak Herman, SP., M.ENG), Kepala Bidang Perencanaan evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (Bapak Imam Mubarak, S.STP), Kepala Bidang Infrestruktur dan kewilayahan (Bapak Andri, S.ST), Kepala Bidang Perekonomian dan SDA (Bapak Yuri Siswanto, S.ST), Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Bapak Hendrawan, ST) serta pengambilan sampel ketiga OPD yakni OPD Dinas Pendidikan (Ibu Eka), Dinas Dukcapil (Bapak Agustian), dan Dinas PU (Bapak Miko Anggriawan) sebagai data pendukung.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang bervariasi yaitu berupa foto, rekaman wawancara, literatur penelitian yang relevan dengan penelitian dan Undang-Undang atau Peraturan yang menjadi pendukung dalam penerapan aplikasi di Kabupaten Bangka Selatan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Tupoksi BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016.

#### **1. Penerapan aplikasi *E-Planning* Oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) di Kabupaten Bangka Selatan**

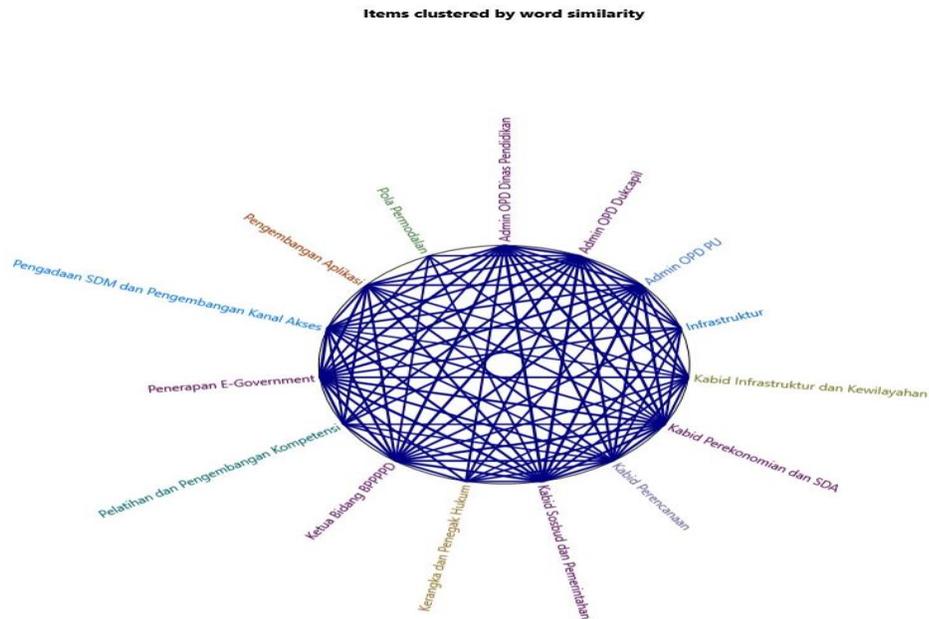
Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pada pasal 262 menjelaskan bahwa untuk rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, terukur, responsif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, terukur dan berwawasan lingkungan. Maka diturunkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan secara terperinci dan jelas terkait dengan Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, RPJPD dan RKPD. Adapun penjelasan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu pada pasal 14 menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD, RPJPD dan RKPD penyusunan harus berbasis e-planning.

Diterapkannya aplikasi e-planning merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan tujuan dapat mengawal pembagunan disetiap daerah agar seluruh perencanaan daerah dapat berjalan dengan lancar, seluruh perencanaan dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah dipantau. Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan aplikasi e-planning ini tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak hambatan dan rintangan sehingga diperlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan. Adapun untuk mengetahui dalam proses penerapan kebijakan e-planning di Kabupaten Bangka Selatan, maka diperlukannya indikator untuk menilai sejauh mana penerapan aplikasi e-planning tersebut.

Dari hal tersebut, sejalan dengan teori penerapan e-governmen dari para ahli seperti Richardus Eko Indrajit dalam Arianto (2015) menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) komponen penting dalam penerapan e-government yakni *Content Development* (pengembangan aplikasi), *Competency Building* (pelatihan dan pengembangan kompetensi), *Connectivity* (infrastruktur), *Cyber Laws* (Kerangka Penegak Hukum), *Citizen Interfaces* (pengadaan SDM dan pengembangan kanal akses), dan *Capital* (pola permodalan). Adapun yang menjadi mediator yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan aplikasi e-planning dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Gambar 3. 1**

**Diagram Clauster Analysis NVivo**



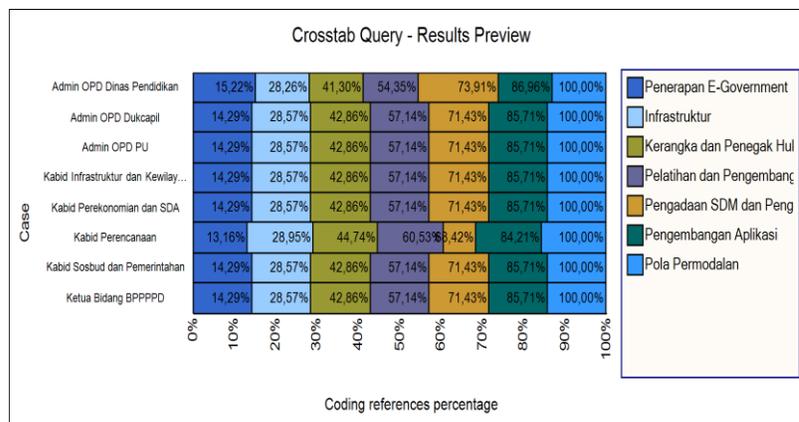
(Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Fitur Cluster Analysis by Nvivo 12 Plus,2019)

Melalui hasil analisis dokumen melalui aplikasi Nvivo 12 plus, dalam penerapan *e-government* dalam *e-planning* menjelaskan bahwa aplikasi *e-planning* ini seimbang dan saling berkaitan dengan ke 6 indikator tersebut. Dalam penjelasan dalam diagram diatas maka terdapat garis tebal yang menandakan bahwa narasumber atau responden tersebut fasih dan mengerti dalam menjelaskan dalam indikator penerapan *e-government* dalam aplikasi *e-planning* tersebut. Adapun dari keenam indikator yang mana pada jika dilihat dengan seksama maka indikator *pertama*, pengembangan aplikasi memiliki garis yang paling tebal pada pembahasan narasumber Ketua Badan dan Kabid Sosbud dan Pemerintahan.

*Kedua*, indikator pengadaan SDM dan pengembangan kanal akses paling banyak dibahas oleh Ketua Badan, Kabid Sosbud dan Pemerintahan, Kabid Perekonomian dan SDA, Admin OPD Dinas Pendidikan, Admin OPD PU dan Admin OPD Dukcapil. *Ketiga*, indikator pelatihan dan pengembangan kompetensi paling banyak dibahas oleh Kabid perekonomian dan SDA dan admin OPD PU. *Keempat*, pada indikator Infrastruktur pembahasan paling banyak dijelaskan pada narasumber Ketua Badan BPPPPD dan Kabid sosbud dan pemerintahan. *Kelima*, kerangka dan penegak hukum indikator ini banyak dijelaskan oleh Kabid perencanaan, Kabid perekonomian dan SDA, dan Ketua Badan BPPPPD. Pada indikator *keenam* yaitu indikator pola permodalan, indikator ini banyak dibahas oleh Ketua badan BPPPPD dan Kabid perekonomian dan SDA. Hal yang dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi *e-planning* di Kabupaten Bangka Selatan telah memenuhi kriteria/indikator dan tahapan proses dalam penerapan e-government.

**Gambar 3.2**

**Hasil Analisis Fitur Crosstab Query by Nvivo**



(Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Fitur Crosstab Query by Nvivo 12 Plus)

**Tabel 3.1****Persentase Pencapaian Penerapan E-Government dalam E-Planning**

	Penerapan E-Government	Infrastruktur	Kerangka dan Penegak Hukum	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Pengadaan SDM dan Pengembangan Kanal Akses	Pengembangan Aplikasi	Pola Permodalan	Total
Admin OPD Dinas Pendidikan	14,29%	12,5%	12,5%	12,5%	18,75%	12,5%	12,5%	14,29%
Admin OPD Dukcapil	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Admin OPD PU	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Kabid Perekonomian dan SDA	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Kabid Perencanaan	10,71%	12,5%	12,5%	12,5%	6,25%	12,5%	12,5%	10,71%
Kabid Sosbud dan Pemerintahan	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Ketua Bidang BPPPPD	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Diolah penulis melalui fitur Nvivo 12 Plus)

Berdasarkan paparan hasil *chart* olahan dokumen dari aplikasi Nvivo 12 plus diatas, menjelaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan terdapat narasumber yang mengatakan bahwa penerapan aplikasi e-planning ini mencapai angka 14.29% yaitu dari admin OPD Dinas Pendidikan, Bidang Perencanaan 10,71% dan ke 6 (enam) narasumber lainnya mencapai angka 12,5%. hal

tersebut menegaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning tidak berjalan dengan baik. Keenam indikator penerapan e-government dipaparkan sebagai berikut:

### **1.1 Content Development (Pengembangan Aplikasi)**

Menurut Indrajit (2005:18) dalam skripsi Aryanto (2015) menjelaskan bahwa Content Development merupakan suatu pembaharuan aplikasi terhadap perangkat lunak, adapun bentuk pembaharuan tersebut seperti bahasa dalam pemrograman, standar teknis pada aplikasi, spesifikasi sistem berbasis data, kesepakatan *user interface* dan banyak lagi bentuk pengembangan aplikasi lainnya. Pengembangan aplikasi ini dilakukan, agar selalu adanya perubahan serta dapat memodifikasi sistem tersebut sesuai dengan format masing-masing pengguna. Berdasarkan paparan hasil *chart* olahan dokumen dari aplikasi Nvivo 12 plus diatas, menjelaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan pada indikator pengembangan aplikasi yang mana pada seluruh narasumber hanya menunjukkan angka 12,5 %, hal tersebut menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Berbicara terkait pengembangan aplikasi yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh BPPPPD terhadap sistem perencanaan daerah dengan menggunakan sistem aplikasi *e-planning*. Pengembangan aplikasi tersebut seperti penambahan *tools*, pengembangan

program, dan lain sebagainya, telah diterapkan oleh pihak BPPPPD. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG, selaku Kepala Badan BPPPPD, melalui wawancara berikut ini:

*“Jadi, gini mbak aplikasi e-planning ini merupakan suatu instrumen yang yang diciptakan oleh kementrian dalam aturan melalui Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu terkait tentang perencanaan daerah. Nah, aplikasi ini sendiri adalah aplikasi yang diturunkan oleh pemerintahan pusat yang mana aplikasi ini sistem pengelolaannya daerah yang menentukan dari segi ITnya. Terus, untuk IT kita sendiri sangat kurang memadai dari segi SDM, jadi kita berkerja sama dengan pihak ke 3 yaitu dari Universitas Darma Persada tentu melalui konsultan untuk menghendel semua. Untuk pengembangan aplikasi memang sudah dilakukan, malahan pengembangan aplikasi e-planning ini sudah dilakukan sebelum aplikasi ini turun untuk digunakan oleh setiap OPD di Kabupaten Bangka Selatan untuk pengisian restra dan renja oleh OPD. Pengembangan yang dilakukan oleh BPPPPD sudah cukup baik, bentuk pengembangan aplikasi tersebut adalah penambahan tools dan kolom sesuai dengan kebutuhan pengisian kolom data pada program yang ada RPJPD, RPJMD dan RKPD agar OPD yang menginput tidak terlalu bingung lagi”.* (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bersama dengan Bapak Yopi Mustika, SE, selaku Pemegang (Selaku Master Admin) yang berada dalam pada aplikasi *e-planning*, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Pengembangan aplikasi sudah dilakukan, memang itu suatu hal yang sangat penting dalam menerapkan aplikasi e-planning ini, hal tersebut untuk mempermudah penerapan aplikasi itu sendiri . Pengembangan aplikasi dilakukan yaitu pada tahun 2017 sebelum diterapkannya aplikasi ini kepada setiap OPD. Kualitas pengembangan aplikasi yang dilakukan selama ini cukup baik, tidak ada komplanin terhadap sistem ataupun tools yang ada dalam aplikasi Pengembangan aplikasi dilakukan oleh pihak BPPPPD sendiri dengan bantuan dari pihak ke 3 yaitu Universitas Darma Persada yang telah bekerja sama dengan daerah. Pengembangan pada sistem berupa penambahan tools dan*

*kolom pada aplikasi untuk mengisi kebutuhan data yang akan di upload ke aplikasi e-planning itu sendiri”.* (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 12.00 WIB)

Dari pernyataan dari Kepala Badan dan Kabid Perencanaan yang sekaligus pemegang aplikasi (master aplikasi), menandakan bahwa bahwa benar adanya bahwa pengembangan aplikasi memang sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu yang diterapkan pada panduan Permendagri No 86 Tahun 2017. Dalam jurnal Universitas Tadulako, Risnandar (2014) yang mengatakan bahwa pengembangan aplikasi memang suatu indikator yang menjadi sangat perlu diperhatikan, karena dengan adanya pengembangan aplikasi maka penyampaian informasi berbasis e-government selalu lebih teratur, sinkron dan dapat mempermudah pengguna.

Pengembangan aplikasi memang sangat penting dilakukan, sebab dengan adanya pengembangan aplikasi terhadap sistem, berbagai hal yang dilakukan terutama dalam menginput data program kegiatan untuk perencanaan agar lebih teratur dan sinkron serta mempermudah pengguna aplikasi serta dapat . Dalam wawancara bersama dengan Bapak Hendrawan, ST, selaku Admin Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah, beliau menambahkan informasi terkait dengan pengembangan aplikasi dilakukan, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Aplikasi e-planning ini adalah aplikasi yang bersifat mempermudah atau sebagai penghubung antara BPPPPD dengan OPD. Tidak hanya itu saja, aplikasi e-planning ini juga sangat ramah lingkungan karena OPD dalam mengumpulkan berkas perencanaan tidak menggunakan kertas HVS lagi, kalo salah tinggal edit lagi begitu. Untuk*

*pengembangan aplikasi tentu dari BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan sudah melakukan pengembangan, pengembangan aplikasi dilakukan oleh Bidang perencanaan karena mereka sebagai master admin posisinya. Bentuk pengembangannya yaitu seperti penambahan fitur-fitur serta penambahann kolom kerja agar proses penyusunan sesuai, agar tidak membingungkan pengguna”. (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 12.00 WIB)*

Selain itu terkait dengan pengembangan aplikasi yang dilakukan, terutama pada sistem pengelolaan data sudah melakukan pengembangan aplikasi. Hal serupa juga sudah dijelaskan oleh setiap bidang dalam BPPPPD yaitu seperti Bapak Andri, S.ST selaku Ketua Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam hasil wawancara berikut:

*“Aplikasi e-planning terus dikembangkan agar lebih mudah digunakan dan menjadi media informasi serta dapat menghasilkan system pelaporan yang efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adapun bentuk pengembangan yang dilakukan yakni penambahan fitur, penambahan kolom dan lain sebagainya dengan tujuan agar mempermudah dalam penggunaan maupun penginputan suatu data”. (Wawancara, selasa, 10 Desember 2019, 14.05 WIB)*

Sesungguhnya dilakukannya pengembangan aplikasi yaitu untuk mempermudah seluruh OPD maupun bidang dalam menggunakan aplikasi *e-planning* dalam melakukan penginputan perencanaan pada setiap OPD. Hal tersebut merupakan menjadi suatu acuan untuk menginput perencanaan sesuai dengan kebutuhan penginputan kegiatan OPD dalam perencanaan daerah. Namun pada kenyataannya adanya pengembangan aplikasi *e-planning* ini tidak diketahui oleh admin setiap OPD. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh

Miko Anggriawan selaku Staf admin e-planning yang berada OPD PU, beliau mengatakan bahwa:

*“Pengembangan aplikasi kita sebagai OPD tidak begitu tau, kita disini sebagai pengguna jadinya saja. Tetapi mungkin ada, karena aplikasi ini sangat lengkap terkait fitur-fitur sangat membantu, dan kebutuhan untuk menginput apapun sudah terdapat dalam aplikasi e-planning ini”.* (Wawancara, jum’at , 06 Desember 2019, 10.00 WIB)

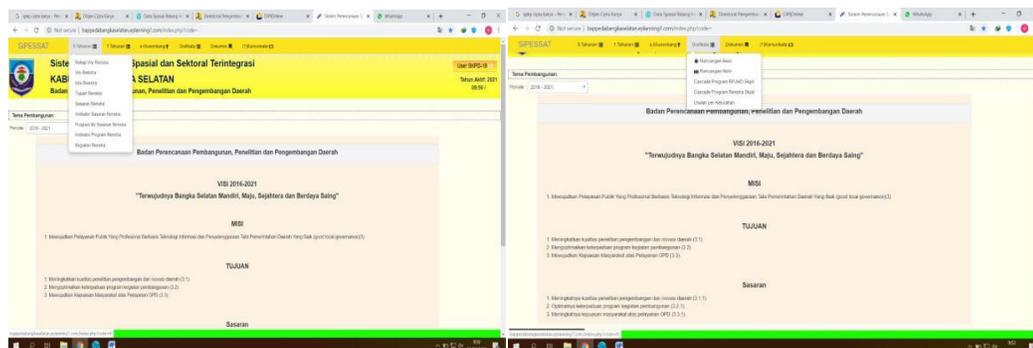
Hal serupa juga dikemukakan oleh Agustian selaku admin e-planning pada OPD Dukcapil, yang mengatakan bahwa:

*“Untuk pengembangan aplikasi saya kurang tau ya, atau saya kurang update informasi terkait itu. Barangkali ada pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh BPPPPD, selama saya sebagai admin dalam penginputan kegiatan perencanaan OPD dukcapil saya menggunakan fitur dalam aplikasi sesuai apa yang ditampilkan yang diajarkan melalui pelatihan yang diadakan oleh BPPPPD. Standarisasi pengembangan aplikasi saya rasa sesuai dengan patokan dalam permendagri nomor 86 tahun 2017”.* (Wawancara, senin, 09 Desember 2019, 09.30 WIB)

Berikut ditampilkan gambaran aplikasi e-planning Kabupaten Bangka Selatan beserta fitur-fitur apa saja yang terdapat didalamnya:

**Gambar 3. 2**

### **Aplikasi E-Planning Kabupaten Bangka Selatan**



(Sumber: BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan)

Dari hasil wawancara dari berbagai informan yang saling berkaitan dalam penggunaan aplikasi e-planning, dapat disimpulkan bahwa BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pengembangan aplikasi terhadap aplikasi perencanaan daerah yakni e-planning dan dampak dalam pengembangan aplikasi e-planning dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan memberikan kemudahan bagi setiap admin bidang atau admin OPD (pengguna). Hal tersebut serupa dengan pendapat dari beberapa pengguna aplikasi dengan banyaknya respons dari admin pengguna aplikasi e-planning baik dari admin bidang dan admin setiap OPD ini yang merasakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi e-planning dalam melakukan seluruh kegiatan penginputan perencanaan dari setiap OPD. Akan tetapi pengembangan aplikasi hanya diketahui pihak yang ada dalam BPPPPD saja.

Namun, jika membahas terkait dengan pihak yang melakukan pengembangan aplikasi e-planning bukan dari pihak dari BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan secara langsung tetapi melainkan pada pihak ke 3 yakni dari Universitas Darma Persada karena keterbatasan SDM terkait pengolahan IT di Kabupaten Bangka Selatan. Jadi, walaupun pengembangan aplikasi e-planning dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dari Universitas Darma Persada tetapi tetap pemegang hak untuk melakukan pengembangan aplikasi atas keputusan dari BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan, pihak ketiga hanya menjalankan perintah

dari BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan yang mana pengembangan aplikasi dilakukan untuk mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi.

## **1.2 Competency Building (Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi)**

Menurut Indrajit (2005:18) dalam skripsi Aryanto (2015) Competency Building adalah suatu kegiatan terkait dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi suatu keahlian yang ditujukan untuk seluruh Sumber Daya Manusia pada lingkup Pemerintahan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh pemerintah untuk pegawai sangat perlu dilakukan, karena pelatihan diperuntukkan untuk membantu meningkatkan keterampilan pegawai, sedangkan pengembangan untuk meningkatkan keolahan dokumen wawancara dari aplikasi Nvivo 12 plus diatas, menjelaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan pada indikator mampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Begitu pula dengan hasil paparan hasil *chart* pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mana pada seluruh narasumber hanya menunjukkan angka 12,5 %, hal tersebut menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Pelatihan yang dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan untuk pegawai terutama untuk para pemegang admin aplikasi e-planning ada dan sudah diterapkan, akan tetapi untuk pengembangan kompetensi belum diterapkan.

Adapun jenis dari pelatihan yakni seperti penjelasan teknis penggunaan aplikasi dan sistematika pengisian atau menginput perencanaan kedalam aplikasi. Pada kenyataan dilapangan, memang pelatihan dan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelatihan dan pengembangan kompetensi belum berjalan secara rutin dan termasuk jarang dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG yang bertindak sebagai Kepala Badan BPPPPD Kabupate Bangka Selatan, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pengguna aplikasi e-planning para OPDkan itu sudah diterapkan. Untuk pelatihan itu kita adakan pada tahun 2017, awal-awal diterapkannya aplikasi kita mengadakan pelatihan aplikasi e-planning terkait mekanisme pengisian ke aplikasi, sistematika, fungsi setiap tools serta fitur-fitur lainnya dan lain sebagainya, pelatihan kita baru mengadakan 1 kali selama penerapan. Sedangkan pengembangan kopetensi kita tidak mengadakan pengembangan kopetensi karena aplikasi e-planning sendiri kan hanya sebuah alat untuk mengisi suatu perencanaan kegiatan para OPD dan terus dikumpulkan menjadi 1 dokumen perencanaan daerah”. (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)*

Adapun pernyataan serupa terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan , yang selebihnya diungkapkan oleh Bapak Yopi Mustika, SE, selaku master admin sekaligus pemegang kendali aplikasi e-planning mengungkapkan sebagai berikut:

*“Untuk pengembangan kompetensi itu tidak kami lakukan setiap bulan ataupun tahun. Pernah melakukan, yakni pada tahun 2017 tetapi pengembangan kompetensi hanya dilakukan 1 kali saja yaitu pada saat pelatihan terkait aplikasi e-planning. pelatihan pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2017 hanya 1 kali pelatihan saja ditahun berikutnya sudah tidak ada lagi. Pelatihan juga diadakan diruangan rapat dikantor BPPPPD selama 3 hari. Pelatihan berupa tentang tata cara menggunakan*

*aplikasi, sistematika, dan mekanisme pengoprasian aplikasi tersebut. Namun bisa dapat kita pastikan bahwa SDM yang menjadi admin OPD ataupun admin bidang sudah paham dan sudah biasa dalam menggunakan aplikasi berbasis web”. (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)*

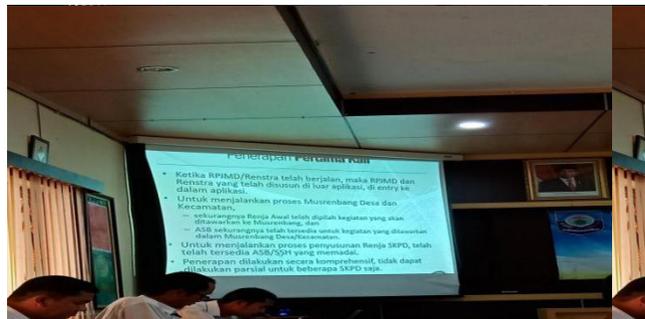
Hal tersebut juga berbading lurus dengan pernyataan dari Miko Anggriawan selaku admin OPD PU terkait dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang didapatkan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pelatihan sudah disediakan dan dilakukan oleh pihak BPPPPD, isi dari pelatihan itu terkait seperti cara penggunaan, fungsi masing-masing fitur, penjelasan tujuan penerapan aplikasi dan lain sebagainya dan pelatihan itu diadakan selama 3 hari. Pengembangan kompetensi sendiri tidak ada diadakan, saya sudah mengikuti dan menggunakan aplikasi e-planning ini dari awal jadi menurut saya tidak ada pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPPPPD untuk OPD, namun kita biasanya orang yang menggunakan aplikasi ini yang dinilai orang yang mampu mengoprasikannya”. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2019, 10.00 WIB)*

Berikut ini ditampilkan hasil dokumentasi pelatihan yang diadakan BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan:

**Gambar 3.3**

### **Pelatihan Aplikasi E-Planning Di Kabupaten Bangka Selatan**



(Sumber: BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan)

Dari hasil wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan terhadap para pegawai yang terlibat dalam penerapan aplikasi e-planning belum maksimal. Dalam mengimplementasikan kebijakan e-government tentu memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta mahir dalam menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi *e-government* (Sandi dkk, 2019). Ketidak maksimalan dalam pelatihan dan pengembangan aplikasi tersebut dikarenakan pelatihan sudah diterapkan akan tetapi hanya 1x selama aplikasi e-planning ini berjalan yaitu pada tahun 2017 setelah pelatihan tidak pernah diadakan 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, namun untuk pengembangan kompetensi belum sama sekali dilaksanakan.

Sehingga dikarenakan hal tersebut maka para OPD yang tidak mendapatkan pengetahuan dan perkembangan yang baru terkait dengan aplikasi, sehingga pengetahuan dan kemampuan pegawai OPD dalam mendapatkan dan menguasai aplikasi *e-planning* sangat kurang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa indikator penembangan SDM merupakan masuk ke dalam Tahap 1 dalam penerapan e-government yaitu persiapan. Aspek penting dalam tahap persiapan yakni Sumber Daya Manusia yang memadai, dan yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas suatu SDM yaitu melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga penulis menganggap bahwa dalam hal *competency building* di Kabupaten Bangka Selatan

harus dilakukan pembenahan agar proses penerapan aplikasi e-planning dapat maksimal.

Terkait dengan pengembangan kompetensi tidak begitu diperhatikan karena mereka menganggap bahwa aplikasi *e-planning* ini merupakan bukan suatu aplikasi yang digunakan setiap hari seperti pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya sehingga harus melakukan pengembangan kompetensi untuk para pegawai, akan tetapi aplikasi *e-planning* tidak digunakan setiap hari tetapi digunakan dalam 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali yaitu penyusunan program kegiatan OPD, RPJMD dan lain sebagainya yang terkait dengan perencanaan daerah, admin di setiap OPD yang diutuskan yaitu orang sudah sangat fasih serta kompeten dalam menggunakan internet dalam berbasis *web*. Tidak dipungkiri jika terdapat pegawai baru yang diutuskan untuk sebagai admin aplikasi di suatu instansi, maka pegawai baru tersebut akan sulit untuk menggunakan aplikasi e-planning ini.

### 1.3 Connectivity (Infrastruktur)

Pada jurnal ilmiah publika yang menyatakan bahwa *connectivity* merupakan ketersediaan infrastruktur seperti telekomunikasi, media komunikasi dan jaringan internet yang dapat digunakan sebagai penghubung portal untuk mengakses internet (Lestari, 2016). Jadi, ketersediannya infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menunjang penerapan aplikasi e-government sehingga dapat berjalan dengan baik dan optimal. Asil paparan *chart* olahan dokumen wawancara dari aplikasi Nvivo 12 plus diatas, menjelaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan pada indikator infrastruktur menunjukkan angka 12,5%, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam infrastruktur untuk menerapkan aplikasi *e-planning* di Kabupaten Bangka Selatan masih terdapat kekurangan dan masih menjadi suatu hambatan yang dirasakan.

Namun memang pada dasarnya infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang utama untuk keberhasilan penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan. Mengenai infrastruktur yang disediakan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan sebagai penunjang untuk penerapan aplikasi e-planning sangat baik dan cukup memadai, namun untuk jaringan memang masih menjadi kendala terbesar di Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG beliau selaku Ketua Badan BPPPPD:

*“Sarana yang digunakan untuk menjalani dan menggunakan aplikasi e-planning dan disediakan oleh pemerintah daerah ya seperti laptop, paling utama yaitu jaringan harus memadai, server yang memadai, printer,*

*kertas, wifi serta alat lain yang saling berhubungan. Kalo prasarana sih ruangan kantor masing-masing tentu memadai disertai fasilitas yang baik dan ruang rapat untuk perbincangan aplikasi kita juga ada di belakang kantor. Terkait sarana kendala yang sangat mencolok dan menjadi keluhan setiap pegawai dalam menerapkan aplikasi dilapangan itu ya seperti jaringan yang selalu tidak memadai, kadang di kepulauan tu sulit untuk mengakses jadi kita terkendala waktu juga sedangkan jaringan yang kurang memadai". (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)*

Kondisi infrastruktur merupakan menjadi sebuah penunjang dan menjadi hal yang utama bagi suatu daerah agar penerapan kebijakan, apalagi kebijakan tersebut berupa media teknologi dan informasi agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Adapun pernyataan lain yang mengungkapkan hal yang serupa terkait dengan infrastruktur disampaikan oleh Bapak Yopi Mustika, SE, selaku master admin sekaligus pemegang kendali aplikasi e-planning mengungkapkan sebagai berikut:

*"Untuk pengembangan kompetensi itu tidak kami lakukan setiap bulan ataupun tahun. Pernah melakukan, yakni pada tahun 2017 tetapi pengembangan kompetensi hanya dilakukan 1 kali saja yaitu pada saat pelatihan terkait aplikasi e-planning. pelatihan pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2017 hanya 1 kali pelatihan saja ditahun berikutnya sudah tidak ada lagi. Pelatihan juga diadakan diruangan rapat dikantor BPPPPD selama 3 hari. Pelatihan berupa tentang tata cara menggunakan aplikasi, sistematika, dan mekanisme pengoprasian aplikasi tersebut". (Wawancara, kamis, 12 Desember 2019, 15.15 WIB)*

Namun pernyataan terkait dengan penyediaan infrastruktur pendukung untuk menerapkan aplikasi e-planning ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yuri Siswanto, S.ST selaku ketua Bidang Perekonomi dan SDA melalui wawancara, beliau mengatakan bahwa:

*"Sarana dan prasarana yang ya seperti sever memadai, jaringan, wifi, laptop, printer, dan alat atk lainnya yang mendukung program*

*penerapan aplikasi e-planning. Untuk peralatan yang rusak untuk mengimplementasikan aplikasi ini saya rasa belum ada OPD dari bidang saya yang mengeluh hal tersebut. Prasarananya yaitu ruang kerja yang memadai dan ruang rapat”. (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 10.30 WIB)*

Adapun pernyataan wawancara bersama Ibu Eka selaku admin OPD dari Dinas Pendidikan yang berbanding terbalik dengan pernyataan dari Ketua Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah, yang menyatakan jika infrastruktur terutama jaringan memang sangat kurang, terutama untuk OPD kecamatan di pulau-pulau terpencil. Melalui wawancara sebagai berikut:

*“Untuk ketersediaan infrastruktur saya kira kita sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengimplemtasikan e-government seperti kebutuhan laptop, wifi, printer dan kebutuhan ATK lainnya. Namun, ada sih beberapa masalah dalam pengkoneksian hal tersebut disebabkan karena jaringan yang kadang kala lemot terutama di Kecamatan pulau-pulau kecil tp itu bukan karena pihak bappeda yang kurang dalam memberi fasilitas tetapi memang jaringan disini kurang mendukung. Itu yang menjadi kekurangan selama ini dan belum adanya solusi untuk permasalahan itu”. (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 10.00 WIB)*

Dalam wawancara bersama Bapak Agustian dari OPD Dukcapin pun mendapatkan hasil data yang sama yakni kendala dalam infrastruktur, beliau mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sarana yang disediakan oleh daerah untuk menerapkan aplikasi e-planning ini tentunya seperti laptop, wifi, printer dan alat ATK lainnya, dan serta terpenting harus memiliki jaringan yang memadai. Namun di daerah kabupaten bangka selatan terkait dengan jangkauan jaringan belum sangat memadai. Untuk prasarana kita menggunakan yaitu ruangan kantor yang telah disediakan untuk kegiatan sehari hari”. (Wawancara, Senin, 09 Desember 2019, 09.30 WIB)*

Adapun pandangan infrastruktur dilansir dalam Silabus.web.id yang menyatakan bahwa suatu konsep infrastruktur yang dimanfaatkan dan diarahkan

secara optimal sumberdaya informasi yang ada sehingga dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan *e-government*. Dari situs web tersebut menyakatan bahwasannya infrastruktur ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengoprasian kebijakan yang berbasis teknologi dan informasi. Dari hasil wawancara yang didapat dari para responden dapat disimpulkan bahwa kondisi infrastruktur terkait sarana dan prasaranan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan cukup baik, seperti laptop, Printer, flashdiks dan lain sebagainya.

Namun yang menjadi keluhan setiap pegawai yang mengimplmentasikan aplikasi e-planning ini yakni infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang kurang memadai. Hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya informasi dari pegawai yang sulit pada saat mengakses dan menginput data. Selain itu permasalahan terkait jaringan masih kurang dibenahi oleh pemerintah daerah, sehingga permasalahan itu pun dibiarkan berlarut-larut begitu saja.

Dalam penelitian ini sehingga penulis menganggap bahwa dalam connectivity atau infrastruktur yang ada di Kabupaten Bangka Selatan harus dilakukan pembenahan agar proses penerapan apikasi e-planning dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dari beberapa permasalahan yang ada terutama dalam penerapan aplikasi e-planning ini menjadi terganggu.

#### **1.4 Cyber Laws (Kerangka dan Penegak Hukum)**

Menurut Indrajit (2005:18) dalam skripsi Aryanto (2015) memandang Cyber laws merupakan payung hukum diberlakukan penerapan aplikasi e-planning. Keberadaan kerangka dan penegak hukum ini menjadi penguat untuk menjalankan aktivitas pelaksanaan aplikasi e-planning, menjadi sebuah acuan untuk mengimplementasikan terkait mengapa aplikasi e-planning ini menjadi aplikasi yang sangat penting untuk dibuat dan dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan serta mempunyai perangkat hukum yang dapat melindungi penerapan aplikasi e-planning.

Adapun bentuk dari kerangka dan penegak hukum bermacam-macam seperti perundang-undang, surat keputusan, peraturan bupati, permendagri dan lain sebagainya yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan. Mengenai kerangka penegak hukum yang digunakan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dalam menegakkan penerapan e-government yaitu mengacu pada upaya pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan agar setiap penyelenggaraan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, efektif dan efisien sesuai dalam mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yopi Mustika, SE, selaku master admin sekaligus pemegang dan kendali aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Kerangka hukum yang kita gunakan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus transparansi, efektif dan efisien. Selanjutnya disertai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 untuk pedoman penyusunan perencanaan daerah berbasis e-planning. beserta dengan Perbub terkait tentang sistem perencanaan daerah terintegrasi”.* (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 12.00 WIB)

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG selaku Ketua Badan BPPPPD Kabupatn Bangka Selatan yang menyatakan serupa terkait dengan kerangka dan penegak hukum dalam penerapan aplikasi e-planning, dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Seperti yang saya katakan sebelumnya kerangka dan penegak hukum untuk menjalankan aplikasi e-planning ini ya terutama dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada pasal 14 ya kalo gak salah, maaf saya kurang ingat juga semoga aja bener. Selanjutnya Perbub terkait dengan sistem perencanaan berbasis aplikasi dalam Perbub Nomor 4 tahun 2018. Selain praturan suart keputusan dari bupati untuk diedarkan kepara OPD pada bidang perencanaan serta bekerja tupoksi masing-masing”.* (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yuri Siswanto, S.ST selaku Kepala Bidang Ekonomi dan SDA, beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Penegak hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi e-planning ini tentu peraturan dari menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 yang mana dalam menginput seluruh perencanaan daerah harus berbasis pada aplikasi e-planning. Selain itu kita didukung oleh perbut terkait tentang sistem informasi perencanaan berbasis elektronik di darah kabupaten bangka selatan. Dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-,masing yaitu terdapat dalam perbub nomor 56 tahun 2016”.* (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 10.30 WIB)

Hal penelitian lewat teknik wawancara yang tertera diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan e-government dalam aplikasi e-planning sudah memiliki dasar hukum atau kerangka dan penegak hukum. Kerangka dan

penegak hukum yang menjadi sebuah acuan dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan yakni Undang-Undang 23 tahun 2014, Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Perbub nomor 4 tahun 2018 dan Perbub nomor 56 tahun 2016. Hal tersebut menjadi penilaian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan sangat mendukung penerapan e-government dalam e-planning untuk diterapkan ke daerah.

Pada dasarnya sesungguhnya tanpa adanya payung hukum yang memayungi suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak dapat memiliki penegak hukum yang kuat. Hal tersebut menjelaskan bahwa mengapa kerangka dan penegak hukum sangat penting untuk dijadikan dalam melaksanakan kebijakan, terutama pada kebijakan penerapan aplikasi e-planning.

## 1.5 Citizen Interfaces (Pengadaan SDM dan Pengembangan Kanal Akses)

Citizen Interfaces merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan SDM dan pengembangan kanal akses. Pengembangan SDM memang sangat perlu dilakukan hal tersebut dikarenakan untuk menunjang aktivitas penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan adanya SDM yang berkualitas maka tidak menolak kemungkinan segala kebutuhan aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan penerapan aplikasi e-planning akan dapat dilaksanakan dengan maksimal jika SDMnya memadai.

Namun, pada kenyataan di lapangan, pengadaan SDM sama sekali tidak dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan ataupun dengan pihak terkait selama awal diterapkan kebijakan aplikasi e-planning. Hal tersebut beralasan bahwa pihak BPPPPD memanfaatkan SDM yang ada sedangkan APBD kurang mencukupi untuk melakukan rekrutmen. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG selaku Kepala Badan BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dalam wawancara berikut:

*“Pengadaan SDM khusus yang diadakan oleh BPPPPD untuk lowongan mengimplementasikan aplikasi e-planning sendiri tidak ada, kita memanfaatkan SDM yang ada dalam masing-masing dinas/OPD dibidang perencanaan. Untuk SDM memang kita sangat kekurangan, ya mau gimana lagi jika kita rekrutmen PHL kita mau gam mau harus melihat APBD juga. Jadi kita milih untuk memanfaatkan pegawai yang ada, lagian tidak begitu rumit juga untuk menggunakan aplikasi e-planning ini. Kualitas SDM saya kira sudah cukup baik, selama aplikasi e-planning ini diterapkan tidak ada kesulitan yang diamali SDM”. (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)*

Hal ini juga berbanding lurus dengan pernyataan dari Bapak Yopi Mustika, SE selaku Master Admin terkait dengan pengadaan SDM informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut:

*“Penerapan aplikasi e-planning kita tidak melakukan pengadaan SDM, disini kita mengandalkan SDM yang ada dibidang perencanaan setiap OPD”.* (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 12.00 WIB)

Adapun informasi tambahan lain juga didapatkan terkait dengan pengadaan SDM melalui wawancara bersama dengan Bapak Hendrawan, ST selaku Ketua Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Penerapan aplikasi e-planning ini kita dibentuk TIM yang terbagi menjadi tim admin bidang yaitu 3 bidang-bidang yang ada di BPPPPD ini, super admin itu pada bidang perencanaan evaluasi dan informasi pembangunan daerah dan admin kecil yaitu OPD yang berada diperencanaan. Taraf kita tidak harus bagaimana-bagaimana namun harus kriteria orang yang paham atau mahir menggunakan laptop serta pandai dalam urusan web dan aplikasi. Kita tidak membuka lowongan untuk khusus pengguna aplikasi disetiap OPD, kita memanfaatkan SDM yang ada di masing-masing OPD. Kualitas SDM saya kira cukup baik, kadang kesulitan kita itu kadang harus ada orang baru dalam pengguna aplikasi jadi mereka harus datang ke kantor dan belajar dari awal lagi”.* (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 12.00 WIB)

Secara tidak langsung pengadaan SDM menurut BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dalam menerapkan aplikasi e-planning bukan merupakan suatu yang harus dijalani karena aplikasi ini juga mudah digunakan dan aplikasi ini juga tidak digunakan setiap harinya dan buka merupakan aplikasi yang bersifat pelayanan terhadap keperluan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Ibu Eka selaku admin OPD Dinas Pendidikan, diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Pengadaan SDM untuk mengembangkan aplikasi, saya rasa tidak ada ya. Karena kita memanfaatkan SDM yang ada dalam daerah istilah lainnya seperti sistem tunjuk untuk menggunakan aplikasi ini tp orang yang dalam bidang perencanaan saja. Lagi pula aplikasi ini digunakan juga tidak setiap hari namun 1 tahun sekali jika ada perubahan dalam RKDP OPD atau 5 tahun sekali dan aplikasi ini juga bukan aplikasi yang bersifat pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat”. (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 10.00 WIB)*

Hal tersebut juga ditegaskan oleh admin OPD lainnya seperti dari Bapak Agustian selaku Admin OPD Dukcapil, dalam wawancara beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“Pengadaan SDM kalo di OPD kita, tidak ada. Memanfaatkan pegawai yang ada di bidang perencanaan serta saling membantu dalam mengemban tugas itu saja. Kualitas SDM sangat baik karena rata kelulusan pun SI serta mahir dalam menggunakan laptop dan menggunakan web-web pemerintahan”. (Wawancara, Senin, 09 Desember 2019, 09.30 WIB)*

Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan pengadaan SDM yang dilakukan Kabupaten Bangka Selatan, dapat disimpulkan bahwa BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan sama sekali tidak melakukan pengadaan SDM dalam mengimplementasikan aplikasi e-planning dan itu bukan menjadi permasalahan setiap pihak yang terkait dalam penerapan aplikasi sehingga permasalahan tersebut masih bisa teratasi. Adapun penyebab tidak dilaksanakannya pengadaan SDM yakni jika dilihat dari kualitas SDM maka SDM Kabupaten Bangka Selatan sudah memiliki SDM yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari tidak adanya kesulitan yang dirasakan oleh setiap pegawai selama berjalannya penerapan aplikasi e-planning, dalam wawancara. Selain itu juga dalam pelaksanaan penerapan aplikasi e-planning oleh setiap admin OPD atau

admin bidang BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan beranggapan dalam penerapan aplikasi e-planning ini tidak begitu rumit lalu beranggapan bahwa aplikasi e-planning ini bukan aplikasi yang bersifat pelayanan kepada masyarakat sehingga harus melakukan dan membutuhkan kinerja yang ekstra akan tetapi aplikasi e-planning digunakan 1 tahun sekali jika mengalami perubahan kegiatan pada OPD saja.

Berikutnya, mengenai pengembangan kanal akses. Pengembangan kanal akses merupakan indikator yang sangat penting dalam penerapan aplikasi e-government, karena pengembangan kanal akses diperlukan agar dijadikan sebagai penunjang dan dapat memberikan suatu kemudahan bagi pihak yang terlibat atau pengguna dalam penerapan aplikasi e-planning. Karena pada dasarnya kanal akses diperlukan agar setiap OPD dapat mengakses informasi setiap program kegiatan yang telah disahkan. Di Kabupaten Bangka Selatan, aplikasi e-planning merupakan bukan aplikasi yang bersifat terbuka oleh masyarakat atau konsumsi publik hal tersebut merupakan untuk mengakses aplikasi diperlukan *user name* dengan *password* setiap masing-masing OPD.

Terkait dengan pengembangan kanal akses yang diberikan BPPPPD, pemerintah daerah telah memberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh masing-masing OPD guna untuk pengaksesan sisten aplikasi e-planning seperti tata cara penggunaan melalui kegiatan pelatihan, jaringan internet, fitur yang tdk membingungkan dan lain sebagainya yang bersifat mendukung penerapan. Namun dalam kondisi lapangan atau kenyataannya, pengaksesan aplikasi e-planning

masih ada ditemukan keluhan yang dirasakan oleh OPD, keluhan-keluhan tersebut antara lain kondisi jaringan yang kurang memadai hal tersebut menjadi hambatan hingga saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka selaku Admin OPD dari Dinas Pendidikan, mengungkap sebagai berikut:

*“Untuk mengakses aplikasi ini sendiri sangat mudah untuk saya sebagai admin OPD, karena aplikasi ini sudah menyediakan kolom untuk mengisi setiap program dari dinas kita setiap 5 tahun kedepan. Namun untuk masalah pengaksesan mungkin biasanya kendala di jaringan saja”.*  
(Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 10.00 WIB)

Adapun pernyataan dari narasumber lain yang berbanding lurus dengan pernyataan sebelumnya, yakni dari Bapak Miko Anggriawan selaku pengguna sekaligus admin OPD dari Dinas PU, mengungkapkan sebagai berikut:

*“Kita sebagai pengguna akses aplikasi e-planning ini sangat mudah, tidak ada keriwahan yang dirasakan, tampilan fitur-fitur mudah dipahami, mudah dalam mengakses dan serta sangat membantu dalam pekerjaan. Kembali lagi jika posisi jaringan di daerah sedang baik itu sangat mudah diakses”.* (Wawancara, Jum’at, 06 Desember 2019, 10.00 WIB)

Pendapat lain terkait dengan pengembangan kanal akses yang OPD rasakan dalam mendapatkan mengakses sistem aplikasi e-planning diungkapkan oleh Bapak Herman, SP., M.ENG selaku Ketua Badan BPPPPD kabupaten Bangka Selatan, mengungkapkan sebagai berikut:

*“Pengembangan kanal akses juga sudah dijalankan, untuk komplant tidak ada ya karena kita sudah merancang aplikasi e-planning ini sudah semudah mungkin digunakan untuk pegawai setiap OPD. Kalau ada yang komplant tanda kutip tidak mengerti dan kurang paham ya, itu ya karena dia pegawai baru ditempatkan dibagian perencanaan untuk mengisi kegiatan OPD ke aplikasi e-planning dan sebelumnya tidak pernah mengikuti pelatihan. Karena tahun lalu kan baru dibuka penerimaan CPNS juga jadi ya PNS yang baru itu ditempatkan di bagian perencanaan”.*  
(Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yuri Siswano, S.ST selaku ketua Bidang Perekonomian dan SDA, beliau menambahkan sebagai berikut:

*“Untuk mengakses aplikasi e-planning ini bagi saya sangat mudah, begitu pula dengan meginput setiap program kegiatan. Aplikasinya sudah bagus dan baik jika di kembangkan dengan konsisten, namun ada beberapa kendala dalam mengakses yaitu seperti kesulitan jaringan. Sebab tidak semua persebaran jaringan dikabupaten bangka selatan ini merata, seperti dipulau kecil itu sangat susah mengakses”.* (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 10.30 WIB)

Dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengembangan kanal akses yang dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih ada kendala terhadap pengaksesan yang dialami Oleh OPD yakni seperti masalah jaringan yang kurang memadai. Namun terkait dengan dalam penggunaan aplikasi dinilai sangat baik dan mudah dipahami oleh pengguna (OPD). Akan tetapi perlu diketahui bahwa aplikasi e-planning ini master admin berada pada bidang perencanaan, yang mana bidang perencanaan memiliki hak yang leluasa dalam menggunakan aplikasi seperti menutup aplikasi jika masa pengisian yang telah ditentukan kegiatan masing-masing OPD sudah habis dan membuka aplikasi jika dibutuhkan.

Selain terkait dengan pengembangan kanal akses, pengadaan sumber daya manusia (SDM) di BPPPPD untuk masing-masing OPD tidak pernah dilakukan. Hal tersebut disebabkan, karena BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan APBD yang ada tidak mencukupi untuk melakukan rekrutmen pegawai (PHL) baru, jadi penerapan menggunakan dan memanfaatkan SDM yang ada di

Staf Perencanaan masing-masing OPD. Adapun anggapan lain menyatakan bahwa tidak perlunya melakukan pengadaan SDM dalam meakukan penerapan aplikasi e-planning karena aplikasi e-planning merupakan aplikasi bersifat yang dikonsumsi oleh pemerinah (G2G) digunakan pada saat penyusunan perencanaan yakni penyusunan programkerja OPD (1 tahun) dan penyusunan RPJMD, bukan aplikasi yang pelayanan terhadap masyarakat (G2C) dan dapat di akses oleh masyarakat yang digunakan terus menerus. Hal tersebutlah yang menjadi dasar alasan mengapa BPPPPD tidak mengadakan rekrutment pegawai PHL dalam penerapan aplikasi e-planning.

## 1.6 Capital (Pola Permodalan)

Menurut Indrajit (2005:18) dalam skripsi Aryanto (2015) *capital* merupakan pola permodalan atau pembiayaan yang dikeluarkan dalam penerapan aplikasi e-government, pembiayaan yang berkaitan dengan keperluan selama penerapan. Pola permodalan merupakan suatu unsur yang penting dalam membiayai proses pelaksanaan kebijakan e-government. Hal tersebut dikarenakan pola permodalan menjadi faktor terpenting dan harus ada dalam melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu pola permodalan yang baik sangat diperlukan untuk keperluan untuk penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan.

Di BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan sudah menerapkan pola permodalan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penerapan aplikasi e-planning. Adapun jenis permodalan yang dianggarkan yakni seperti berupa fasilitas penunjang untuk penerapan aplikasi yakni jaringan wifi, server, dan serta pengembangan aplikasi, yang seluruh pembiayaan yang digunakan untuk penerapan aplikasi e-planning menggunakan anggaran APBD. Mengenai pola permodalan yang dilakukan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dalam penerapan aplikasi e-planning, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Herman, SP., M.ENG beliau selaku Kepala Badan BPPPPD, beliau mengungkapkan:

*“Untuk seluruh permodalan dalam mengimplmentasikan aplikasi e-planning ini, dari segi pengadaan pelatihan, pembayaran konsultan untuk bekerja sama dengan pihak ke 3, alat kebutuhan yang digunakan dan lain sebagainya itu kita menggunakan anggaran APBD yang sudah dirancang sedemikian rupa. Namun dana anggaran yang kita klola dan alokasikan*

*hanya untuk pengelolaan saja seperti perbaikan jaringan, pengelolaan infrastruktur dan lain sebagainya yang bersifat tekni". (Wawancara, Kamis, 12 Desember 2019, 13.15 WIB)*

Pembahasan mengenai anggaran pembiayaan yang digunakan untuk penerapan aplikasi perencanaan daerah yaitu e-planning juga diungkapkan oleh Bapak Yopi Mustika, SE, selaku master admin sekaligus pemegang dan kendali aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan, dalam wawancara bersama beliau sebagai berikut:

*"Aplikasi e-planning ini sendiri merupakan sub rekening pada program perencanaan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di BPPPPD. Sehingga seluruh program ini secara resmi dibiayai oleh APBD". (Wawancara, Senin, 16 Desember 2019, 12.00 WIB)*

Hal serupa juga diungkapkan dalam wawancara peneliti bersama Bapak Yuri Siswanto selaku Ketua Bidang perekonomian dan SDA, sebagai berikut:

*"Mengenai permodalan, semua anggaran yang kita gunakan untuk membiayai terkait dengan kebutuhan penerapan aplikasi e-planning ini menggunakan dana anggaran APBD Kabupaten Bangka Selatan. Misalnya terkait dengan permasalahan pada jaringan, infrastruktur dan lain sebagainya yang lebih bersifat teknis". (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 10.30 WIB)*

Selain itu juga terdapat pernyataan dari pihak lain yang mempertegas dan berbanding lurus dengan pernyataan narasumber lainnya yang menyatakan bahwa seluruh biaya atau pola permodalan kegiatan yang berkaitan tentang penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan itu bersumber dari dana anggaran APBD daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diungkapkan oleh

Bapak Hendrawan, ST selaku Ketua Bagian Sosial Budaya dan Pemerintahan, sebagai berikut:

*“Pola permodalan dalam penerapan aplikasi e-planning ini itu semua kita menggunakan dari dana APBD kabupaten bangka selatan, untuk mendetailnya saya kurang tau mba nanti coba tanya sama yang lebih berwewenang”.* (Wawancara, Rabu, 11 Desember 2019, 12.00 WIB)

Hal serupa juga dikatakan oleh Narasumber OPD lainnya mendukung bahwa memang dana atau pola permodalan yang digunakan untuk membiayai penerapan aplikasi e-planning (aplikasi perencanaan) Kabupaten Bangka Selatan yakni menggunakan APBD daerah. Seperti pernyataan wawancara bersama Bapak Miko Anggriawan selaku staf perencanaan dinas PU, Sebagai berikut:

*“Untuk besaran nominal anggaran kita kurang tau untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan aplikasi e-planning, karena itu memang bukan suatu garis wewenang kita sebagai OPD, kita hanya sebagai penjalan aplikasi tersebut. Tetapi untuk alasan anggaran saya tau, seluruh anggaran dari segi apapun itu melalui dana anggaran APBD Kabupaten Bangka Selatan”.* (Wawancara, Jum’at, 06 Desember 2019, 10.00 WIB)

Permodalan dalam penerapan suatu kebijakan memang menjadi suatu hal yang paling utama. Hal tersebut dijelaskan dalam Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) ditulis oleh Novia Safitri, dkk (2019) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kebijakan yang berbasis aplikasi maka perlu anggaran yang mencukupi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permodalan menjadi faktor terpenting dalam mengsucceskan kebijakan implementasi e-government.

Jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi e-planning dalam indikator pola permodalan yang disediakan oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam anggaran APBD. Adapun penganggaran berupa fasilitas yang digunakan untuk penerapan, kegiatan yang berkaitan, serta berupa kegiatan teknis dan non-teknis dalam instansi masing-masing OPD. Selain itu juga seluruh anggaran yang digunakan untuk menunjang segala kebutuhan dalam penerapan aplikasi e-planning di Kabupaten Bangka Selatan.